

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong Tahunan Tahun Anggaran 2025 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan- LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara periode tersebut adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar 1.291.072.266 atau mencapai 86,04% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.500.536.000. Realisasi Belanja Negara periode sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp15.394.577.752 atau mencapai (36,46%) dari alokasi anggaran sebesar Rp42.220.142.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp22.766.523.853 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp239.828.000. Aset Tetap (neto) sebesar Rp21.614.328.853. Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp 22.766.523.853

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025

adalah sebesar Rp1.273.914.090. Sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp13.843.995.365, sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (12.570.081.275). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(12.618.766.599).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 20.369.417.966 dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(12.618.766.599) ditambah dengan koreksi reklasifikasi dan koreksi nilai aset non revaluasi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp14.103.505.486. Kenaikan atau penurunan ekuitas sebesar Rp1.484.738.887. Sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp21.854.156.853.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Sorong

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sesuai yang di amanatkan Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJMN memiliki satu misi "Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional" berdasarkan misi tersebut maka Satker Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengoptimalkan potensi yang ada untuk pencapaian misi yang dimaksud dalam RPJMN tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong berkomitmen dengan visi "*Pengelolaan Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Kerja Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong Secara Terpadu dan Berkelanjutan.*" Dan misi "*Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Wilayah Kerja Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong.*" .

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya

Pesisir dan Laut Sorong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan